

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam proses kepemimpinan di Indonesia, baik dilingkungan pemerintah pusat maupun daerah sebagai sistem kenegaraan, maka dikenal adanya pemilihan umum (pemilu). Pelaksanaan pemilu merupakan bentuk dari sistem demokrasi yang dianut oleh Negara Indonesia dalam menentukan struktur dan fungsi kenegaraan. Dalam proses pemilihan umum, semua rakyat harus ikut tanpa ada pembedaan. Dengan terlibatnya masyarakat sebagai warganegara dalam proses pelaksanaan pemilu, diharapkan warga negara akan mendapatkan pengalaman langsung selayaknya seorang warga negara berkiprah dalam sistem demokrasi. Rakyat diharapkan paham dan memahami posisinya sebagai pemegang kedaulatan yang sangat menentukan gerak serta perjalanan bangsa dan Negara.

Pemilihan umum merupakan salah satu pilar penting dari demokrasi, dan merupakan substansi dasar sistem demokrasi itu sendiri. Melalui pemilu, rakyat memilih para wakil rakyat untuk duduk dalam parlemen dan dalam struktur pemerintahan. Ada negara yang menyelenggarakan pemilu hanya apabila memilih wakil rakyat untuk duduk dalam parlemen, namun ada juga negara yang menyelenggarakan pemilu untuk memilih para pejabat tinggi Negara, sampai ke proses pemilihan kepala daerah.¹

¹ A. Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007, hal 102.

Setiap partai bertujuan untuk meraih kekuasaan untuk memerintah. Itu tentunya bukan sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai sarana untuk melaksanakan misi mensejahterakan rakyat. Dalam perjalanannya, partai sering lupa dan cenderung meremehkan kecerdasan masyarakat pemilih bahwa masyarakat terus-menerus menilai kiprah partai. Apakah partai berjalan sendiri demi "kejayaannya" atau benar memperhatikan aspirasi konstituennya. Di luar itu, masyarakat memilih sebuah partai dalam pemilu karena merasa punya rasa kepemilikan atas partai yang dipilihnya, antara lain dengan merasa terwakili dalam partai oleh misinya, ideologinya atau orang per orang yang duduk dalam kepengurusan partai. Bila semua unsur itu tidak ada, tidak ada alasan baginya untuk menjatuhkan pilihan kepada partai tersebut.

Berkaitan dengan proses pemilu, maka dikenal dengan adanya sebuah partai dengan cirikhas ideologi yang akan dibawa oleh elit politik dalam partai. Partai Amanat Nasional (PAN) merupakan salah satu dari berbagai peserta pemilu yang tergolong dalam sistem demokrasi di Indonesia. Terkait dengan adanya partai Amanat Nasional (PAN), maka yang menarik adalah keberadaan partai PAN di Kota Yogyakarta. Dari sisi keterwakilan masyarakat yang majemuk dalam partai, belakangan PAN juga menjadi semakin eksklusif. PAN, seperti beberapa partai lain, juga terjebak dalam konsep kekuasaan yang keliru. Hal tersebut dibuktikan bahwa partai PAN tidak mampu konsisten dalam politik untuk tujuan kekuasaan.

Pemilu Legislatif pada tahun 2009 yang pada dasarnya berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya dengan diikuti oleh 38 Partai politik, serta mekanisme tentang sistem suara terbanyak, berdasarkan pada Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai calon legislatif (caleg) pada Pemilu 2009 ditentukan melalui sistem suara terbanyak, bukan berdasarkan nomor urut seperti berlaku selama ini. Kemudian fakta menunjukkan bahwa pertarungan besar memperebutkan kursi legislatif masih didominasi oleh partai-partai politik besar. Survei-survei nasional yang dilakukan lembaga-lembaga survei pada tahun 2007, 2008, dan 2009 menunjukkan tiga tempat teratas kemungkinan akan diperebutkan oleh PDI Perjuangan, Partai Golkar, dan Partai Demokrat, diikuti partai-partai Islam seperti Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan, serta partai baru yakni Partai Hati Nurani Rakyat.²

Dari perebutan kursi legislatif pada tahun 2009, maka penulis akan memfokuskan mengenai pengaruh dukungan tokoh dan warga Muhammadiyah terhadap partai Amanat Nasional (PAN) dalam pemilihan legislatif di Kota Yogyakarta. Jika melihat historis perjalanan partai PAN dalam sistem demokrasi dan politik untuk tujuan kekuasaan pada kenyataannya PAN memiliki keistimewaan yang termuat dalam visi bahwa dalam hal pembangunan masyarakat, Partai Manat Nasional (PAN) mencita-citakan suatu masyarakat Indonesia yang demokratis, berkeadilan sosial,

² Mujani, Saiful, *Mengamati Pengamat Pemilu*, dalam *Koran Tempo*, Jakarta, Edisi 17 Juni 2009.

mandiri dan cerdas. Dalam hal pemerintahan, partai PAN juga menentang segala bentuk kediktatoran, totalitarisme, dan otoriterisme, karena berlawanan dengan harkat dan martabat manusia serta memperjuangkan hak rakyat, HAM dan supremasi hukum. Hal tersebut merupakan modal serta keunggulan partai PAN dalam visi dan misi yang akan di laksanakan dalam demokrasi.

Untuk Kota Yogyakarta, partai PAN pada dasarnya memiliki dukungan yang penuh dari sebagian masyarakat dan tokoh Muhammadiyah di Kota Yogyakarta, yang dipengaruhi oleh Muhammadiyah sebagai basis dari partai PAN. Namun pada kenyataannya partai PAN kalah dalam pemilu legislatif tahun 2009. Melihat kenyataan tersebut diatas, adanya kelemahan sistem yang ada pada Partai Amanat Nasional (PAN) di Kota Yogyakarta merupakan penyebab kekalahan PAN dalam perebutan kursi legislatif pada tahun 2009. maka tentu ada indikasi atau penyebab kekalahan partai PAN dalam merebut kursi legislatif pada tahun 2009 di Kota Yogyakarta. Adapun yang menyebabkan kekalahan Partai Amanat Nasional (PAN) di Kota Yogyakarta dikarenakan:

1. Adanya konflik internal partai
2. Tidak konsistennya pimpinan Partai Amanat Nasional dalam membawa ideologi partai,
3. Tekanan politik dari lawan partai.

Salah satu contoh yang membuktikan bahwa adanya konflik internal Partai Amanat Nasional (PAN) adalah peristiwa yang terjadi dalam perebutan

kursi kepengurusan di dalam partai PAN. Contoh lain, misalnya keluarnya sejumlah elit partai akibat internal dan bergabung ke dalam partai lain. Akibatnya PAN harus pasrah menerima 3 (tiga) kali kekalahan, yaitu pemilu 1999, 2004 dan 2009.

Dalam konteks pemilu legislatif di Kota Yogyakarta, partai PAN mengalami kekalahan dalam perebutan suara untuk seluruh wilayah Kota Yogyakarta. melihat data KPUD pada tahun 1999-2009, maka terlihat partai PAN selalu kalah dalam perebutan suara dengan memperoleh 59.108 suara pada tahun 1999 dan 52.954 suara tahun 2004 serta 26.828 suara tahun 2009. suara terbanyak masih diungguli partai PDI-P dan Demokrat. Data suara dan kursi dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Data Perolehan Suara Tahun 1999 Di Kota Yogyakarta

No	NAMA PARTAI	KOTA YOGYAKARTA	%	KURSI PAN
1	PDIP	97.972	35,65	17
2	PAN	59.108	17,27	
3	GOLKAR	27.438	14,34	
4	PKB	11.290	14,26	
5	PPP	12.430	4,87	

Data: Dapil Yogyakarta Tahun 1999

Setelah melihat data kursi di Kota Yogyakarta diatas, maka berikut perolehan serta perbandingan suara Parpol Pemilu Legislatif tahun 2004 sampai dengan 2009 di Kota Yogyakarta dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:

Tabel 1.2
Data Perolehan Suara Tahun 2004 Di Kota Yogyakarta

No	NAMA PARTAI	KOTA YOGYAKARTA	%	KURSI PAN
1	PDIP	59.758	26,30	19
2	PAN	52.848	18,57	
3	GOLKAR	23.804	13,87	
4	PKB	6.539	10,36	
5	PKS	24.990	7,82	

Data: Dapil Yogyakarta Tahun 2004

Tabel 1.3
Data Perolehan Suara Tahun 2009 Di Kota Yogyakarta

No	NAMA PARTAI	KOTA YOGYAKARTA	%	KURSI PAN
1	PDIP	42.554	18,98	13
2	PD	50.405	16,54	
3	PAN	26.414	13,46	
4	GOLKAR	15.800	10,29	
5	PKS	23.118	10,06	

Sumber: Diolah dari data perolehan suara Pemilu 2009 KPUD

Melihat data tabel perolehan suara tahun 2004-2009 di Kota Yogyakarta, maka dapat dilihat perolehan suara terbanyak di raih oleh PDI-P dalam dua priode yaitu tahun 2004 dan 2009, dan urutan ke dua adalah PAN pada tahun 2004. hadirnya demokrat menambah keterpurukan PAN dalam perolehan suara. Untuk pemilu legislatif pada tahun 2009 Demokrat menjadi urutan kedua dan disusul oleh PAN dengan urutan ketiga. Hal ini membuktikan bahwa kalahnya partai PAN disebabkan karena bertahannya partai lain dan juga munculnya partai baru yang dapat mengusung suara misalnya partai Demokrat. Untuk tahun 2004 partai PAN terlihat dalam tabel

lebih unggul dalam perolehan suara dibanding partai yang ada di bawahnya, namun pada tahun 2009 PAN hanya mampu memperoleh suara 26.414 suara.

Partai PAN pada tahun 2009, khususnya dalam pemilu legislatif di Kota Yogyakarta hampir setiap daerah dan kecamatan memperoleh kursi paling sedikit dan hanya unggul di tiga kecamatan di Kota Yogyakarta yaitu Karaton, Umbulharjo dan Kotagede. Namun pada tahun 2009 terbukti partai PAN hanya mampu memperoleh suara terbanyak dalam satu daerah saja yaitu Kotagede. Begitu juga dengan perolehan suara untuk wilayah. Hal tersebut terjadi karena ada dugaan banyaknya pihak yang tidak konsisten terhadap perjuangan partai PAN yang sebagian besar dari basis yang sama yaitu muhammadiyah.

Pengaruh lain juga disebabkan adanya kepengurusan partai PAN yang tidak konsisten dan kurang percaya diri dalam perjuangan politik khususnya di Kota Yogyakarta. perbandingan suara pada pemilu legislatif 2009 di Daerah Kota Yogyakarta juga terjadi *split ticket voting* yang semakin kuat menyebabkan parta PAN kalah dalam pemilu legislatif maupun pemilihan presiden di Daerah Kota Yogyakarta.

Kemudian pengaruh dukungan tokoh dan warga Muhammadiyah yang tidak sepenuhnya mendukung pada proses pemilihan final di Kota Yogyakarta. Hal tersebut merupakan hubungan yang sangat erat dengan kalahnya perolehan suara partai PAN di Kota Yogyakarta. Dengan penyebab kalahnya partai PAN di Kota Yogyakarta, maka kemudian pada sidang Tanwir Muhammadiyah merekomendasikan kepada Pimpinan Pusat

Muhammadiyah agar mempersiapkan strategi partai politik untuk menghadapi proses pemilu priode selanjutnya.

Permasalahannya adalah bahwa Kota Yogyakarta adalah basis muhammadiyah yang cukup besar, namun pada prinsipnya tidak dapat mengusung perolehan suara dalam pemilu legislatif, terutama dari priode 2004 sampai 2009. Hal yang mempengaruhinya adalah konsistensi PAN terhadap masyarakat Muhammadiyah di Kota Yogyakarta dalam berpolitik, kemudian di pengaruhi oleh politik kepartaian dari pemerintah maupun lawan partai lainya seperti PDIP dan DEMOKRAT.

Pada praktiknya bahwa perubahan sistem pada partai PAN telah dilakukan untuk merebut suara dalam pemilihan umum, namun dalam pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2009 di Kota Yogyakarta masih tidak membawa dampak yang positif. Terbukti parati PAN gagal dalam tiga priode pemilu yaitu tahun 2004 dan 2009. Dari latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah: Bagaimana pengaruh dukungan tokoh dan warga Muhammadiyah dalam mendukung partai PAN terhadap pemilu legislatif tahun 2009 di Kota Yogyakarta.

Hal itulah yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul:”DUKUNGAN TOKOH DAN WARGA MUHAMMADIYAH DALAM PEROLEHAN SUARA PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) TERHADAP PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2009 DI KOTA YOGYAKARTA” .

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu, Bagaimana pengaruh dukungan tokoh dan warga Muhammadiyah dalam perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) terhadap pemilu legislatif tahun 2009 di Kota Yogyakarta.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Penelitian dan penulisan skripsi ini secara umum dimaksudkan untuk mengkaji dan memberi gambaran objektif mengenai Proses pemilu legislatif yang salah-satu tujuannya adalah untuk mengetahui penyebab kekalahan Partai Amanat Nasional dalam proses pemilu legislatif tahun 2009 di Kota Yogyakarta.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan di capai dalam penulisan skripsi ini adalah: Hasil penelitian ini dapat disumbangkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Ilmu Pemerintahan, Penulis dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat di bangku kuliah di lapangan, dapat memberikan masukan kepada masyarakat dan elit politik dalam membangun ideologi partai.

D. Kerangka Dasar Teori

Untuk menjelaskan permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan konsep Pemilihan Umum (Pemilu) dan Konsep Partai Politik dalam mendukung dasar pemikiran untuk mengupas permasalahan yang ada.

1. Pemilu

a. Pengertian Pemilu

Secara universal Pemilihan Umum adalah instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat.³

Definisi di atas menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, membentuk pemerintahan yang absah serta sebagai sarana mengartikulasi aspirasi dan kepentingan rakyat. Negara Indonesia mengikutsertakan rakyatnya dalam rangka penyelenggaraan negara. Kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil rakyat yang duduk dalam parlemen dengan sistem perwakilan (*representative democracy*) atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Wakil-wakil rakyat ditentukan sendiri oleh rakyat melalui Pemilu (*general election*) secara berkala agar dapat memperjuangkan aspirasi rakyat.

Dapat di artikan lebih lanjut bahwa pemilihan umum adalah adalah sebagai syarat minimal bagi adanya demokrasi dan diselenggarakan

³ Mahfud MD. *Perdebatan Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen Konstitusi.*, LP3ES, Jakarta, 2007, hlm, 57.

dengan tujuan memilih wakil rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis.⁴

Penjelasan di atas menyebutkan bahwa pemilihan umum merupakan syarat minimal adanya demokrasi yang bertujuan memilih wakil-wakil rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis. Kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di dalam lembaga perwakilan. Kedaulatan rakyat atas penyelenggaraan pemerintahan dijalankan oleh presiden dan Kepala Daerah yang juga dipilih secara langsung. Anggota legislatif maupun Presiden dan Kepala Daerah karena telah dipilih secara langsung, maka semuanya merupakan wakil-wakil rakyat yang menjalankan fungsi kekuasaan masing-masing. Kedudukan dan fungsi wakil rakyat dalam siklus ketatanegaraan yang begitu penting dan agar wakil-wakil rakyat benar-benar bertindak atas nama rakyat, maka wakil rakyat tersebut harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum.

Berhubungan dengan arti pentingnya penyelenggaraan Pemilihan Umum secara berkala tersebut dikarenakan beberapa sebab diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pendapat atau aspirasi rakyat cenderung berubah dari waktu ke waktu;
- 2) Kondisi kehidupan masyarakat yang dapat juga berubah;

⁴ *Ibid.*

- 3) Pertambahan penduduk dan rakyat dewasa yang dapat menggunakan hak pilihnya;
- 4) Guna menjamin regulasi kepemimpinan baik dalam cabang eksekutif dan legislatif.

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa beberapa sebab pentingnya pemilihan umum diantaranya adalah aspirasi rakyat cenderung berubah, kondisi kehidupan rakyat berubah, pertambahan penduduk dan regulasi kepemimpinan.⁵

Pemilihan umum menjadi sarana untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Kondisi kehidupan rakyat yang cenderung berubah memerlukan adanya mekanisme yang mewadahi dan mengaturnya yaitu melalui proses pemilihan umum. Setiap penduduk dan rakyat Indonesia yang telah dewasa memiliki hak untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Regulasi kepemimpinan baik cabang eksekutif maupun legislatif akan terlaksana secara berkala dengan adanya pemilihan umum.

b. Pemilu dan Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut memerintah dengan perantaraan wakilnya, atau disebut juga pemerintahan rakyat. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.

⁵ <http://www.vfgh.gv.at/cms/vfgh-site/english/index.html> diakses tanggal 11 Juli 2010 jam 20.15.

Demokrasi dan Pemilu sering disederhanakan sebagai dua hal yang sama.⁶

Ada klaim bahwa sebuah negara dikatakan demokratis manakala telah dilaksanakannya Pemilu di negara tersebut. Padahal demokrasi tidak identik dengan Pemilu, meskipun keduanya tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Tidak ada demokrasi tanpa Pemilu, tetapi diselenggarakannya Pemilu bukanlah indikasi dari demokrasi. Kata demokrasi yang dalam bahasa Inggrisnya *democracy* berasal dari bahasa Perancis *democratie* yang baru dikenal abad ke 16, yang dirujuk dari bahasa Yunani (*Greek*) *demokratia* yang berasal dari kata *demos* berarti rakyat (*people*) dan *kratos* berarti tanaman (*rule*). Saat ini, demokrasi identik engan egitimasi kehidupan politik modern, walaupun makna demokrasi menunjukkan modern yang sangat beragam dan luas, mulai dari pemerintah bervisi teknokrat sampai pada konsepsi kehidupan sosial yang ditandai oleh ekstensifnya partisipasi politik.

Demokrasi merupakan sebuah konsep yang berarti pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi (atau kedaulatan) ada di tangan rakyat atau sering juga dikatakan bahwa demokrasi dalah pemerintahan oleh rakyat atau pemerintahan mayoritas. Salah atu defenisi demokrasi yang paling umum, bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih di bawah

⁶ Held, David, *Model of Democracy*, Stanford University Press, Cambridge, 1996, hlm. 1.

sistem pemilihan bebas. Dari batasan ini, tampak beberapa unsur penting ciri demokrasi, diantaranya adanya unsur kekuasaan yang dilaksanakan secara langsung atau melalui perwakilan, kedaulatan di tangan rakyat, sistem pemilihan yang bebas.⁷

Prinsip kedaulatan rakyat dan kebebasan sangat penting dalam konsepsi tersebut di atas. Selain prinsip-prinsip maka demokrasi juga mengandung unsur seperangkat praktek dan prosedur dari sebuah proses pelembagaan kebebasan yang panjang dan berliku. Dari prakteknya, maka demokrasi dapat dibedakan atas dua bentuk, yaitu:

1. Langsung,
2. Tidak langsung (sering disebut demokrasi perwakilan).

Demokrasi langsung adalah sistem demokrasi yang semua warga biasanya aktif terlibat di dalam pembuatan keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh negara; mereka tidak mewakilkan pandangan, pikiran, atau kepentingan mereka pada orang lain yang mengatasnamakan mereka. Demokrasi langsung adalah yang lebih tua atau lebih dikenal sebagai demokrasi masa Yunani kuno atau demokrasi Athena. Demokrasi model ini biasanya dilaksanakan dalam sebuah negara yang kecil dan dengan penduduk yang jumlahnya kecil.

Sedangkan demokrasi tidak langsung bersifat lebih umum dan diberlakukan oleh banyak negara modern saat ini. Jumlah penduduk yang besar dan wilayah negara yang sangat luas menyebabkan lebih

⁷ *Ibid.*

dipilihnya model demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan ini. Dalam model ini warga Negara akan memilih wakil-wakil atau pejabat-pejabat yang akan membuat keputusan atau kebijakan politik, merumuskan Undang-undang dan menjalankan program untuk kepentingan umum atas nama mereka. Warga mewakilkan kepentingan, aspirasi, pikiran, atau pandangan mereka pada para anggota dewan, pemimpin atau pejabat yang mereka pilih melalui Pemilu.

c. Tujuan Pemilihan Umum

Pemilu di Indonesia merupakan mekanisme penentuan pendapat rakyat melalui sistem yang bersifat langsung. Pemilu bertujuan memilih orang atau partai politik untuk menduduki suatu jabatan di lembaga perwakilan rakyat atau lembaga eksekutif, seperti presiden dan wakil presiden, anggota DPR dan MPR, anggota DPD dan MPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten, dan anggota DPD Kota.⁸

Tujuan penyelenggaraan pemilu (*general election*) itu pada pokoknya dapat dirumuskan ada empat, yaitu:

- a. Untuk memungkinkan adanya suatu peralihan dalam kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
- b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
- c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat, dan;

⁸ Op Cit, Miriam Budiharjo.

d. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Secara lebih spesifik, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD menentukan bahwa pemilu diselenggarakan dengan tujuan memilih wakil rakyat dan wakil daerah serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperkokoh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pentingnya pemilu juga dapat dikaitkan dengan kenyataan bahwa setiap jabatan pada pokoknya berisi tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh manusia yang mempunyai kemampuan terbatas. Karena itu, pada prinsipnya setiap jabatan harus dipahami sebagai amanah yang bersifat sementara. Jabatan bukan sesuatu yang harus dinikmati untuk selama-lamanya. Yang dipilih dalam pemilu (*general election*), tidak saja wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen, tetapi juga para pemimpin pemerintahan yang duduk dikursi eksekutif.⁹

Di cabang kekuasaan legislatif, para wakil rakyat itu ada yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat ada yang duduk di Dewan Perwakilan Daerah, dan ada pula yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota, sedangkan di cabang kekuasaan eksekutif para pemimpin yang

⁹ *Ibid.*

dipilih secara langsung oleh rakyat adalah presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.

Dengan adanya pemilu yang teratur dan berkala, maka pergantian para pejabat dimaksudkan juga dapat terselenggara secara teratur dan berkala. Oleh karena itu, adalah sangat wajar apabila selalu terjadi pergantian pejabat baik dilembaga pemerintahan eksekutif maupun di lingkungan lembaga legislatif. Oleh karena itu, pemilu (*general election*) juga disebut bertujuan untuk:¹⁰

- a. Sebagai mekanisme untuk program menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum,
- b. Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan dan pergantian pejabat negara yang diangkat melalui pemilihan (*elected public officials*).

Yang dimaksud dengan memungkinkan disini tidak berarti bahwa setiap kali dilaksanakan pemilihan umum, secara mutlak harus berakibat terjadinya pergantian pemerintahan atau pejabat negara. Mungkin saja terjadi, pemerintahan suatu partai politik dalam sistem parlementer memerintah untuk dua, tiga, atau empat kali. Yang dimaksudkan memungkinkan disini adalah bahwa pemilihan umum harus membuka kesempatan sama untuk menang atau kalah bagi setiap peserta pemilihan umum itu. Pemilihan

¹⁰ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta, 1992 hal 181-182

umum yang demikian itu hanya dapat terjadi jika benar-benar dilaksanakan dengan jujur dan adil.

- c. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dan melaksanakan hak asasi warga negara.
- d. Untuk menentukan kemajuan negara, rakyatlah yang harus mengambil keputusan melalui perantaraan wakil-wakilnya yang akan duduk di lembaga legislatif. Hak-hak politik rakyat untuk menentukan berlangsungnya pemerintahan dan fungsi-fungsi negara dengan benar menurut UUD 1945 adalah hak rakyat yang sangat fundamental.

2. Partai Politik

a. Pengertian Partai Politik

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik menyebutkan bahwa, partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan Negara melalui pemilihan umum.

Berikut beberapa pengertian Partai Politik menurut ahli yaitu:

- 1) Menurut Meriam Budiarjo: Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok

ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik melalui cara yang konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan yang mereka miliki.

2) Menurut Carl J. Friedrich: Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idil maupun materiil. ¹¹

3) Menurut R. H. Soutau: Partai politik adalah sekelompok warga yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan pemerinyhan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.

4) Menurut Sigmund Neumann: Partai politik adalah dari aktivis-aktivis politik yang berusaha menguasai pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar golongan-golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka jelaslah bahwa partai politik merupakan suatu struktur politik yang hadir dalam kehidupan bernegara agar demokrasi bisa ditegakkan. Artinya fenomena politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem

¹¹ A. Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007, hal 102

politik atau Negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan system itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari system politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternative dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih itu. ¹²

Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu tentu diperlukan kebijakan-kebijakan umum yang menyangkut pengaturan dan atau alokasi dari sumber-sumber resources yang ada. Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan itu, perlu dimiliki kekuasaan dan kewenangan, yang akan dipakai baik untuk membina kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Cara-cara yang dipakainya dapat bersifat paksaan. Tanpa unsure paksaan kebijakan ini hanya merupakan perumusan keinginan belaka. Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat, bukan tujuan pribadi seorang. Selain itu politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok termasuk partai politik dan kegiatan individu.

Secara konsep berarti kata politik merupakan segala aktivitas yang dijalankan oleh polis untuk kelestarian dan perkembangannya disebut *politike techne*. Kemudian ia juga berpendapat politik ialah pengertian dan kemahiran untuk mencukupi dan menyelenggarakan keperluan maupun kepentingan bangsa dan Negara.

¹²Budiardjo, Miriam, Prof. 2002. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

b. Fungsi Partai Politik

Sebagai struktur politik, partai politik tentu memiliki fungsi-fungsi tertentu. Ada beberapa fungsi dari partai politik itu dilahirkan, fungsi ini akan sangat berguna dalam keberadaan partai tersebut di tengah-tengah masyarakat. Fungsi utama partai politik itu adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan idologinya.

Melihat fungsinya, partai politik merupakan organisasi politik yang dibentuk dengan suatu tujuan dan melaksanakan fungsi-fungsi tertentu guna pencapaian tujuannya. Menjalankan fungsi-fungsi tersebut merupakan ciri negara yang berdemokrasi. Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program berdasarkan ideologi tertentu. Selain fungsi utama tersebut terdapat beberapa fungsi lain yang dilaksanakan parpol, seperti yang dikemukakan oleh Ramlan Surbakti, 2002 yaitu:

- 1) Fungsi rekrutmen politik,
- 2) Fungsi partisipasi politik,
- 3) Fungsi pemadu kepentingan,
- 4) Fungsi komunikasi politik,
- 5) Fungsi pengendali konflik,
- 6) Fungsi kontrol politik.

Selain fungsi tersebut diatas, ada fungsi lain yang menurut Budiardjo, diantaranya adalah:

- a) Sarana komunikasi politik,
- b) Sosialisasi politik (*political socialization*),
- c) Sarana rekrutmen politik (*political recruitment*),
- d) pengatur konflik (*conflict management*).

Partai politik memiliki sejumlah fungsi dalam mencari dan mempertahankan kekuasaan politik dalam suatu negara. Fungsi partai politik satu sama lainnya memiliki kaitan dalam kelangsungan hidup politik partai. Penjelasan hasil studi tentang fungsi partai politik selama ini masih belum final, walaupun beberapa ahli politik telah mengasumsikan fungsi partai politik kedalam tujuh fungsi utama, selain daripada untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan politik secara konstitusional. Dalam fungsi partai menurut Surbakti, 2002 ini penulis akan menerangkan lebih lanjut mengenai fungsi partai politik secara luas. Pada prinsipnya, cara yang digunakan suatu partai politik dalam sistem politik demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah dengan turut serta dalam pemilihan umum. Apabila kekuasaan untuk memerintah telah diperoleh maka partai politik tersebut pula sebagai pembuat keputusan politik. Partai politik yang tidak menduduki kedudukan mayoritas pada perwakilan rakyat akan berperan sebagai pengontrol partai mayoritas. Penjelasan secara luas

mengenai fungsi partai politik yang melekat dalam suatu partai politik adalah meliputi:¹³

1. Komunikasi Politik

Salah satu tugas partai politik adalah menerima dan menampung semua aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa untuk mengurangi kesimpangsiuran pendapat yang beredar dalam masyarakat. Setelah itu dirumuskan dan diajukan usul kebijaksanaan. Usul kebijaksanaan diajukan kepada pemerintah sebagai program partai. dengan demikian, tuntutan dan kepentingan masyarakat yang disampaikan kepada pemerintah oleh partai politik dijadikan kebijaksanaan umum, itulah sebabnya partai politik dipandang sebagai media prantara antara rakyat dengan pemerintah atau dengan kata lain partai politik sebagai sarana komunikasi politik antara pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah. Dalam hal ini juga partai politik harus responsif terhadap tuntutan masyarakat untuk kemudian disalurkan kepada sistem politik melalui agregasi dan artikulasi kepentingan. Di pihak lain partai politik juga melakukan diskusi dan penyebarluasan tas berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.¹⁴

13 Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia, 1992, hal. 17

14 Budi Winarno, *Sitem Politik Indonesia Era Reformasi*, Yogyakarta, Media Presisndo, 2007, hal. 98

2. Sosialisasi Politik

Dalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Biasanya proses berjalan berangsur-angsur dari masa kanak-kanak sampai dia dewasa. Sosialisasi politik juga mencakup proses penyampaian norma-norma dan nilai-nilai oleh masyarakat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Proses sosialisasi ini bisa diperoleh dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sosial lainnya selama dia masih hidup di dunia. Oleh karena itu, partai politik harus berperan aktif menanamkan norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara.¹⁵

3. Rekrutmen Politik

Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. dengan demikian partai turut memperluas partisipasi politik (*political recruitmen*). Cara-cara yang ditempuh bisa dengan kontak pribadi, persuasi, dan lain-lain. Selain dari itu, partai politik dapat pula mengadakan kaderisasi anggota partai. kaderisasi ini dimaksudkan untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dimasa

¹⁵ Meriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003, hal 163.

mendatang. Untuk itulah, mereka melakukan rekrutmen terhadap pemimpin- pemimpin partai politik yang mampu menopang kekuasaan yang mereka raih. Juga diusahakan untuk menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader partai yang dimasa mendatang akan menggantikan pemimpin lama (*selection of leadership*).

4. Pengatur Konflik

Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan soal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik maka partai politik berusaha untuk mengatasi konflik tersebut. Seperti konflik yang terjadi di Ambon dan Maluku maka disinalah fungsi partai politik untuk menyelesaikan masalah konflik tersebut bukan mempertajam konflik yang terjadi.

5. Artikulasi Kepentingan

Artikulasi kepentingan adalah suatu proses *penginputan* berbagai kebutuhan, tuntutan dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legeslatif. Agar kepentingan, tuntutan dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam pembuat kebijakan publik. Pemerintah dapat mengeluarkan suatu keputusan dapat bersifat menolong masyarakat dan bisa pula dinilai sebagai kebijakan yang justru menyulitkan masyarakat. 16

6. Partisipasi Politik

16 Koirudin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hal. 86

Secara istilah partisipasi politik dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau keterlibatan individu atau warga negara didalam suatu sistem politik yang bertujuan untuk mempengaruhi dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah sampai pada titik tingkatan partisipasi yang bermacam-macam. Dalam tatanan ini, partisipasi politik dapat diarahkan untuk mengubah keputusan pejabat-pejabat yang berkuasa, menggantikan atau mempertahankan pejabat-pejabat itu, atau mempertahankan organisasi sistem politik yang ada dan aturan-aturan permainan politiknya. Mobilisasi warga negara dalam kehidupan dan kegiatan politik merupakan fungsi khas dari partai politik. Di zaman modern partai politik dibentuk yaitu ketika semakin banyak jumlah rakyat mempunyai hak pilih, dan ketika kelompok-kelompok masyarakat menuntut bahwa mereka harus diberi hak untuk bersaing untuk memperebutkan suatu jabatan pemerintahan.

c. Dimensi Partisipasi Politik

Adapun dimensi partisipasi yang dapat mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum seperti yang dikemukakan oleh James Rosenau yang dikutip dalam bukunya Jalaluddin Rakhmat yang berjudul *Komunikasi Politik Khalayak dan Efek* antara lain:

- a) Gaya partisipasi,
- b) Motif partisipasi,

c) Konsekuensi partisipasi seorang dalam politik.

Kemudian mengenai gaya partisipasi politik mengacu kepada apa yang dilakukan maupun bagaimana ia melakukan sesuatu kegiatan. Seperti gaya pembicaraan politik (antara singkat dan bertele-tele), gaya umum partisipasi pun bervariasi. Adapun yang termasuk dalam gaya partisipasi sebagai berikut:¹⁷

- a) Langsung/wakilan. Orang yang melibatkan diri sendiri (*actual*) dengan hubungan yang dilakukan terus-menerus dengan figur politik dengan cara menelepon, mengirim surat, dan mengunjungi kantor pemerintah. Yang lain bertindak terhadap politikus, tetapi tidak bersama mereka, misalnya mereka memberikan suara untuk memilih pejabat pemerintah yang belum pernah dilihat atau ditemuinya.
- b) Kentara/tak kentara. Seseorang mengutarakan opini politik, hal itu bisa meningkatkan kemungkinan diperolehnya keuntungan material (seperti jika mendukung seorang kandidat politik dengan imbalan diangkat untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan).
- c) Individual/kolektif. Bahwa tekanan dalam sosialisasi masa kanak-kanak, terutama dalam kelas-kelas pertama sekolah dasar, adalah pada gaya partisipasi individual (memberikan suara, mengirim surat kepada pejabat). Bukan pada memasuki

¹⁷ Rahman Arifin. 2002. *Sistem Politik Indonesia, Dalam Perspektif Struktural Fungsional*. Surabaya: SIC.

kelompok terorganisasi atau pada demonstrasi untuk memberikan tekanan kolektif kepada pembuatan kebijakan.

- d) Sistematis/acak. Beberapa individu berpartisipasi dalam politik untuk mencapai tujuan tertentu, mereka bertindak bukan karena dorongan hati, melainkan berdasarkan perhitungan, pikiran, perasaan, dan usul mereka untuk melakukan sesuatu bersifat konsisten, tidak berkontradiksi, dan tindakan mereka kesinambungan dan teguh, bukan sewaktu-waktu atau dengan intensitas yang berubah-ubah.
- e) Terbuka/Tersembunyi. Orang yang mengungkapkan opini politik dengan terang-terangan dan tanpa ragu-ragu, dan yang menggunakan berbagai alat yang dapat diamati untuk melakukannya, bergaya partisipasi terbuka.
- f) Berkomitmen/ Tak berkomitmen. Warga negara berbeda-beda dalam intensitas partisipasi politiknya. Orang yang sangat mendukung tujuan, kandidat, kebijakan, atau program bertindak dengan semangat dan antusias; ciri yang tidak terdapat pada orang yang memandang pemilihan umum hanya sebagai memilih satu orang dengan orang lain yang tidak ada bedanya.
- g) Derita/kesenangan. Seseorang bisa menaruh perhatian politik dan melibatkan deritanya karena kegiatan politik itu sendiri merupakan kegiatan yang menyenangkan. Yang lain ingin

mencapai sesuatu yang lebih jauh dari politik melalui partisipasi.

d. Motif partisipasi

Berbagai faktor meningkatkan atau menekan partisipasi politik. Salah satu perangkat faktor itu menyangkut motif orang yang membuatnya ambil bagian. Motif-motif ini, seperti gaya partisipasi yang diberikannya berbeda-beda dalam beberapa hal sebagai berikut:¹⁸

- 1) Sengaja/tak sengaja. Beberapa warga negara mencari informasi dan berhasrat menjadi berpengetahuan, mempengaruhi suara legislator, atau mengarahkan kebijaksanaan pejabat pemerintahan.
- 2) Rasional/emosional. Orang yang berhasrat mencapai tujuan tertentu, yang dengan teliti mempertimbangkan alat alternatif untuk mencapai tujuan itu, dan kemudian memilih yang paling menguntungkan di pandang dari segi pengorbanan dan hasilnya disebut bermotivasi rasional.
- 3) Kebutuhan psikologis/sosial. Bahwa kadang-kadang orang memproyeksikan kebutuhan psikologis mereka pada objek-objek politik misalnya, dalam mendukung pemimpin politik karena kebutuhan yang mendalam untuk tunduk kepada autoritas, atau ketika memproyeksikan ketidacukupannya pada berbagai kelas

18 Surbakti Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

musuh politik yang dipersepsi-minoritas, negara asing, atau politikus dari partai oposisi.

- 4) Diarahkan dari dalam/dari luar. Perbedaan partisipasi politik yang dengan motivasi batiniah dan motivasi sosial untuk berpartisipasi politik.
- 5) Berpikir/tanpa berpikir. Setiap orang berbeda dalam tingkat kesadarannya ketika menyusun tindakan politik. Perilaku yang dipikirkan meliputi interpretasi aktif dari tindakan seseorang dan perkiraan konsekuensi tindakan itu terhadap dirinya dan orang lain.

e. Konsekuensi partisipasi seorang dalam politik

Partisipasi politik yang dipikirkan dan interpretatif dibandingkan dengan jenis yang kurang dipikirkan dan lebih tanpa disadari menimbulkan pertanyaan tentang apa konsekuensi partisipasi bagi peran seseorang dalam politik pada umumnya. Konsekuensi partisipasi seorang dalam politik tersebut memiliki beberapa hal antara lain:

- 1) Fungsional/disfungsional. Tidak setiap bentuk partisipasi mengajukan tujuan seseorang. Jika misalnya tujuan seorang warga negara adalah melaksanakan kewajiban Kewarganegaraan yang dipersepsi, maka pemberian suara merupakan cara fungsional untuk melakukannya.

- 2) Sinambung/terputus. Jika partisipasi politik seseorang membantu meneruskan situasi, program, pemerintah atau keadaan yang berlaku, maka konsekuensinya sinambung. Jika partisipasi itu mengganggu kesinambungan kekuatan yang ada, merusak rutin dan ritual, dan mengancam stabilitas, partisipasi itu terputus.
- 3) Mendukung/menuntut. Melalui beberapa tipe tindakan, orang menunjukkan dukungan mereka terhadap rezim politik yang ada dengan memberikan suara, membayar pajak, mematuhi hukum, menyanyikan lagu kebangsaan, berikrar setia kepada bendera, dan sebagainya. Melalui tindakan yang lain mereka mengajukan tuntutan kepada pejabat pemerintahan-mengajukan tuntutan kepada pejabat pemerintahan, mengajukan petisi kepada anggota kongres dengan surat, kunjungan, dan tetepon; *lobbying* atau menarik kembali dukungan *financial* dari kampanye kandidat.

Berdasarkan dimensi partisipasi politik di atas, bahwa dalam partisipasi politik orang mengambil bagian dalam politik dengan berbagai cara. Cara-cara itu berbeda-beda dalam tiga hal atau dimensi yakni: gaya umum partisipasi, motif partisipasi yang mendasari kegiatan mereka, dan konsekuensi berpartisipasi pada peran seseorang dalam politik.¹⁹

Dengan ketentuan teori diatas, maka partai politik merupakan organisasi politik yang dibentuk dengan suatu tujuan dan melaksanakan

¹⁹ Huntington, Samuel P, Joan Nelson. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta:Rineka Cipta.

fungsi-fungsi tertentu guna pencapaian tujuannya. Menjalankan fungsi-fungsi tersebut merupakan ciri negara yang berdemokrasi. Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program berdasarkan ideologi tertentu. Selain fungsi utama tersebut terdapat beberapa fungsi lain yang dilaksanakan parpol, seperti yang dikemukakan (Surbakti, 2002). Salah satunya pada fungsi input, dimana partai politik menjadi sarana sosialisasi politik, komunikasi politik, rekrutmen politik, agregasi kepentingan, dan artikulasi kepentingan. Fungsi partai politik yang perlu di maksimalkan adalah fungsi sosialisasi. Masyarakat tidak akan mengetahui bagaimana fungsi tersebut apabila tidak ada sosialisasi kepada mereka dan sarana sosialisasi yang utama dapat dilakukan melalui pendidikan politik.

3. Teori Pembentukan Partai

Asal Usul partai politik pada prinsipnya berasal dari 3 teori yaitu: pertama: adalah teori situasi historik yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya sistem politik mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat yang luas. Kedua: adalah teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi.²⁰ Ketiga: adalah teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik.

²⁰ Ramlan Surbakti 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta.

1. Teori Situasi Historik

Teori ini melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. Teori ini menjelaskan krisis historis terjadi manakala suatu sistem politik mengalami masa transisi karena perubahan masyarakat dari bentuk tradisional yang berstruktur sederhana menjadi masyarakat modern yang berstruktur kompleks.

2. Teori Pembangunan

Teori ini melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi. Teori ini juga melihat modernisasi sosial ekonomi, seperti pembangunan teknologi komunikasi berupa media massa dan transportasi, perluasan dan peningkatan pendidikan, industrialisasi, urbanisasi, perluasan kekuasaan negara seperti birokratisasi, dan peningkatan kemampuan individual yang mempengaruhi lingkungan.

3. Teori Kelembagaan

Teori yang melihat ada hubungan antara perlemen awal timbulnya partai politik. Teori mengatakan partai politik dibentuk oleh kalangan legislatif dan eksekutif, karena ada kebutuhan para anggota parlemen yang ditentukan berdasarkan pengangkatan untuk mengadakan kontak dengan masyarakat dan membina dukungan dari masyarakat.

E. Definisi Konsepsional

1. Legislatif adalah badan deliberatif pemerintah dengan kuasa membuat hukum. Legislatif dikenal dengan beberapa nama, yaitu parlemen, kongres, dan asembli nasional.
2. Partai Amanat Nasional adalah partai politik yang memperjuangkan kedaulatan rakyat, demokrasi, kemajuan dan keadilan sosial. Cita-cita partai ini berakar pada moral agama, kemanusiaan dan kemajemukan.
3. Tokoh dan warga muhaammadiyah adalah bentuk masyarakat dalam salah satu orgnisasi Islam pembaharu di Indonesia. Gerakan Muhammadiyah yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan sesungguhnya merupakan salah satu mata rantai yang panjang dari gerakan pembaharuan Islam.

F. Definsi Oprasional

1. Pengaruh Tokoh dan Warga Muhammadiyah

Pengaruh tokoh dan warga Muhammadiyah dalam partisipasi politik, terkait dengan perolehan suara Partai Amanat Nasional di Yogyakarta pada prinsipnya dapat di bedakan sebagai berikut:

Pengaruh dukungan tokoh dan warga Muhammadiyah pada dasarnya dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Sangat Berpengaruh,
- b. Berpengaruh,
- c. Kurang Berpengaruh

d. Tidak berpengaruh.

Artinya dengan berbagai macam pengaruh tersebut, bahwa mengenai dukungan tokoh dan warga Muhammadiyah memiliki perbedaan dalam pengaruhnya terhadap Partai Amanat Nasional. Kemudian mengenai bentuk partisipasi yang dilakukan untuk Partai Amanat Nasional adalah sebagai berikut:

- a. Partisipasi aktif. Dalam arti dukungan penuh untuk perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN),
- b. Partisipasi pasif. Dalam dukungan yang sewajarnya, artinya tidak sepenuhnya warga dan tokoh Muhammadiyah dalam mendukung perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN).

Dalam dukungan serta partisipasi politik, warga dan tokoh Muhammadiyah dalam perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) di Yogyakarta jika dikaitkan dengan kalahnya PAN di Kota Yogyakarta, maka dapat dikatakan bahwa warga dan tokoh Muhammadiyah dalam mendukung perolehan suara tidak dapat dikatakan aktif dan sepenuhnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Mengenai Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif*, yaitu metode yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Serta

penyusunan yang mendeskripsikan fakta yang digali dari objek penelitian.

2. Unit Analisis

Setelah data-data terkumpul dari berbagai hasil pengumpulan data yang ada, maka penulis mengadakan analisa data yaitu proses penyederhanaan data dalam bentuk yang mudah diinterpretasikan. Dalam penelitian ini menggunakan analisa kualitatif yang berupa menyederhanakan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisa ini memandang data sebagai produk dari proses memberikan interpretasikan peneliti yang ada didalamnya sudah terkandung makna yang mempunyai referensi pada nilai. Dengan demikian data yang dihasilkan merupakan konstruksi interaksi antara peneliti dengan informan. Kegiatan analisis dalam penelitian kualitatif hanya merupakan rekonstruksi sebelumnya. Dari pandangan tersebut penelitian kualitatif memproses data penelitian dari reduksi data, penyajian data sampai pada pengambilan kesimpulan.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu teknik yang digunakan untuk mendapatkan data informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan melalui tanya jawab secara langsung. Wawancara dilakukan dengan:

- 1) Bapak Zulfan Purnomo, SH, selaku perwakilan dari tokoh dan warga Muhammadiyah Kauman,

- 2) Bapak Iqbal, sebagai Kabag Rumah Tangga Muhammadiyah Yogyakarta,
- 3) Bapak Muzani, selaku Wakil Ketua Muhammadiyah Yogyakarta,
- 4) Bapak Irawan Argowidodo, selaku Ketua DPD PAN Kota Yogyakarta,
- 5) Ibu Wawan Kurniasih, selaku Komisioner KPU Kota Yogyakarta,
- 6) Bapak Nasrullah, selaku Ketua KPUD Kota Yogyakarta.

b. Dokumentasi

Teknik pengambilan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, arsip, dan lainnya atau dapat dikatakan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Teknik yang dipakai adalah mengembangkan suatu kerangka kerja deskriptif untuk mengorganisasikan studi kasus atau deskriptif kasus. Penganalisaan data hasil penelitian memakai metode analisa deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa bentuk kata-kata tertulis, lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati, yang menunjukkan berbagai fakta yang ada dan dilihat selama penelitian berlangsung. Prosedur analisa datanya adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

b. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan dan penyederhanaan data-data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis. Reduksi data dilakukan dengan cara membuat ringkasan dan mengkode data yang diperoleh dari pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

a. Penyajian data

Penyajian data dilakukan dengan menggambarkan keadaan sesuai dengan data yang sudah direduksi dan disajikan dalam laporan yang sistematis dan mudah dipahami.

b. Menarik kesimpulan

Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan terhadap data yang sudah direduksi dalam laporan dengan cara membandingkan, menghubungkan, dan memilih data yang mengarah pada pemecahan masalah, dan mampu menjawab permasalahan serta tujuan yang ingin dicapai.